

Gempita Karya SDN 2 Gadingharjo



KR-Sukro Riyadi

Panewu Sanden Deny N Hartono berbincang dengan Kepala SDN 2 Gadingharjo Sartini SPd MPd.

BANTUL (KR) - Kegiatan bertema 'Gempita Karya Neroaga SDN 2 Gadingharjo' Kapanewon Sanden Bantul dipusatkan di Balai Kalurahan Gadingharjo, Senin (26/6). Kegiatan tersebut menampilkan berbagai karya siswa dalam bentuk kerajinan dan juga produk makanan. Selain itu, juga ditampilkan beragam kesenian dari siswa-siswi SDN 2 Gadingharjo Sanden.

Kepala SDN 2 Gadingharjo Sanden Bantul Sartini SPd MPd, mengatakan dengan kegiatan tersebut harapannya siswa bisa mengeluarkan potensinya. "Semua karya yang dipentaskan sebagian besar karya siswa kegiatan ekstrakurikuler. Seperti karawitan dan drumband," ujarnya.

Panewu Sanden Deny N Hartono STP MEng, mengatakan program SDN 2 Gadingharjo sudah pasti memberikan inspirasi kepada masyarakat di Sanden dan sekitarnya. "Karena jenjang pendidikan SD sudah mampu menampilkan kreasi seni," jelasnya.

Lurah Gadingharjo Darsana, mengatakan program ini sebagai langkah awal menuju sekolah unggulan. **(Roy)-d**

Bawaslu Kasihan Gandeng Forlitas

BANTUL (KR) - Memasuki tahun politik jelang Pemilu 2024, Bawaslu Kapanewon Kasihan mengajak Forum Rakyat Peduli Tirtonirmolo Amanah Sejahtera (Forlitas) Kalurahan Tirtonirmolo untuk menggalakkan sosialisasi gerakan Anti Politik Uang (APU) kepada masyarakat.

Untuk itu, Bawaslu Kasihan melakukan rapat koordinasi bersama ketua dan anggota Bawaslu, perwakilan Forlitas sebagai pegiat APU, mantan anggota Bawaslu tahun sebelumnya, staf pelaksana PNS, staf pelaksana teknis dan staf pendukung Panwaslu Kapanewon Kasihan di warung ayam Mbok Cemplung Madukismo, Sabtu (24/6).

Ketua Bawaslu Kasihan, Sigit Nur Wibowo SE, mengemukakan kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas Bawaslu Kasihan bersama stakeholder, khususnya pemerintah dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

Dengan adanya sosialisasi ini, pihaknya berharap bisa menciptakan kesadaran berpolitik di tengah masyarakat, khususnya di Kecamatan Kasihan. "Ayo jadi pemilih cerdas dengan mendukung gerakan anti politik uang," tegasnya.

Sementara Dahlan Muhammad mewakili Forlitas menuturkan, Forlitas merupakan wadah komunikasi dan silaturahmi warga Kalurahan Tirtonirmolo yang mempunyai gerakan penyadaran sebagai upaya mewujudkan rakyat yang peduli, kritis, jujur, cerdas, inovatif produktif dan kreatif. "Forum ini merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi pendampingan dan advokasi warga dalam menjalankan kewajiban serta mendapatkan hak-haknya. Forlitas tidak berafiliasi kepada partai politik manapun dan Forlitas sudah berbadan hukum," ungkapnya.

Forlitas mendeklarasikan diri pada 3 Juli 2020 dan sekaligus mendeklarasi sebagai gerakan Anti Politik Uang (APU). Dengan gerakan APU, diharapkan masyarakat sadar tentang bahaya politik uang, sehingga masyarakat berani melapor kepada Bawaslu apabila menemukan adanya praktik politik uang. "Merupakan komitmen Forlitas sebagai pegiat Anti Politik Uang, maka kami siap berkolaborasi dengan Bawaslu maupun pemerintah setempat melakukan sosialisasi gerakan Anti Politik Uang kepada masyarakat," pungkas Dahlan. **(Jdm)-d**

300 PERSONAL AWASI PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

Waspada! Penyebaran Penyakit Hewan Menular

SLEMAN (KR) - Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman Suparmono mengakui, adanya hewan kurban dari luar wilayah Kabupaten Sleman untuk memenuhi kebutuhan dapat berdampak terjadinya penularan dan penyebaran penyakit hewan menular. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sejak tanggal 5 Juni 2023, DP3 Sleman telah menerjunkan petugas medik dan paramedik veteriner di 14 Puskesmas.

"Mereka akan melakukan pemantauan dan pengawasan hewan kurban baik di pasar - pasar tiban maupun di kandang-kandang kelompok yang menyediakan hewan kurban. Untuk data pemantauan titik pasar tiban dan kandang kelompok pada tahun 2022 kemarin sebanyak 352 titik," ungkap Suparmono kepada *KR*,

Senin (26/6).

Sementara sebagai panduan dan pedoman pemotongan hewan kurban, Bupati Sleman telah menerbitkan Surat Edaran nomor : 32 Tahun 2023 bagi semua pemangku wilayah, para takmir masjid dan para panitia kurban. Isinya antara lain tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam pen-

cegahan penyebaran penyakit LSD dan kewaspadaan terhadap penyakit Pes Des Petits (PPR).

"Sesuai pedoman SE tersebut terdapat imbauan pemotongan hewan kurban untuk dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR). Namun mengingat kapasitas dan kemampuan RPHR Sleman di Mancasan Condong-catur Depok tidak mampu untuk melayani, maka pemotongan diperbolehkan dilakukan di luar RPHR yakni di masjid, sekolah atau di instansi lainnya dengan rekomendasi dari DP3 Sleman. Tetapi untuk mendekatkan pelayanan penerbitan rekomendasi pemotongan di luar RPHR maka kepada masyarakat, takmir masjid maupun para panitia kurban

untuk datang langsung ke Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan (UPTD BP4) wilayah I s/d VIII, karena kewenangannya telah dilimpahkan kepada mereka," jelas Suparmono.

Ditambahkan, untuk mengawal pelaksanaan pemotongan hewan kurban dikerahkan 300-an personal yang terdiri dari ASN, non ASN dan kader kesehatan hewan sebanyak 246 orang, Mahasiswa FKH UGM 40 orang dan dukungan dari PDHI sebanyak 30 orang yang dikoordinir oleh 14 Puskesmas. "Mereka bertugas untuk melakukan pemeriksaan antemortem dan melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan daging setelah hewan kurban dipotong (post mortem)," kata Suparmono. **(Has)-d**

Program REHAB, Solusi Jitu Cicil Tunggakan Iuran JKN

SLEMAN (KR) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berinovasi guna memberikan kemudahan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya melalui program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB).

"Program ini diperuntukkan khusus bagi segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) agar dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Latar belakang Program REHAB dikarenakan rendahnya *Ability To Pay* (ATP) Peserta PBPU, khususnya pada masa pandemi Covid-19. Termasuk juga rendahnya tingkat keaktifan Peserta PBPU yang menunggak membayar iuran di atas tiga bulan," ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang

Sleman M Idar Aries Munandar dalam Temu Media BPJS Kesehatan Cabang Sleman Tahun 2023, Senin (26/6).

Menurutnya, tujuan Program REHAB untuk memberikan keringanan finansial bagi peserta JKN yang iurannya menunggak, khususnya segmen PBPU dan BP agar dapat membayar iuran secara bertahap. "Persyaratan untuk mendapatkan Program REHAB, diantaranya peserta termasuk dalam segmen PBPU dan BP yang memiliki tunggakan dengan usia tunggakan 4 sampai dengan 24 bulan. Nantinya, peserta dapat mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165," ujar Aris.

Pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan

kecuali bulan Februari pendaftaran sampai dengan tanggal 27. Ada batas maksimal periode tahapan pembayaran selama satu siklus program, yaitu 12 bulan.

Bagi peserta JKN yang ingin ikut Program REHAB, bisa mengunduh Aplikasi

Mobile JKN. Setelah itu, memilih menu Rencana Pembayaran Bertahap, lalu akan muncul informasi total tunggakan. Kemudian, peserta dapat membaca, menyetujui syarat dan ketentuan, peserta bisa melanjutkan pendaftaran Program

REHAB. Setelah cicilan tagihan muncul, maka peserta dapat membayar tagihan iuran pada kanal-kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, seperti di minimarket, agen PPOB dan lain-lain. **(Awh)-d**



KR-Atiek Widiastuti

Kepala KC BPJS Sleman Aris Munandar dalam temu media.

AL HIJRAH MAJU JAJAKI IKUT BPJS KETENAGAKERJAAN

Aktivitas Usaha Rawan Kecelakaan Kerja

SLEMAN (KR) - Komunitas Al Hijrah Maju menjajaki kemungkinan untuk mengikutsertakan anggotanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini diawali dengan menggelar sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dalam acara rutin Pertemuan dan Arisan Komunitas Al Hijrah Maju di Nologaten Depok Sleman, Minggu (25/6).

Ketua Komunitas Al Hijrah Maju Maryadi mengatakan, komunitas-

nya beranggotakan lebih dari 50 orang, terdiri pedagang, pemilik warung penyetan, warung makan, penjual soto, bengkel dan usaha lainnya.

"Dalam menjalankan aktivitas usaha tentu saja kami juga dihadapkan pada risiko yang setiap saat bisa terjadi, utamanya kecelakaan kerja," kata Maryadi, pemilik warung susu segar di Pogung, Sleman yang akrab disapa Pak Jangkung.

Ary Yusdianto, Account Repre-

sentative Khusus BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program perlindungan sosial untuk para pekerja mandiri atau bukan penerima upah (BPU). Tersedia minimal dua program yang bisa diikuti pekerja BPU, yakni Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM). Namun bisa juga ikut Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sifatnya tabungan.

Terpisah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Teguh Wiyono mengatakan, total angkatan kerja di DIY sebanyak 816.000 tenaga kerja penerima upah (PU) dan yang sudah terdaftar 377.000 tenaga kerja atau 46 persen. Sedangkan untuk bukan penerima upah (BPU) sebanyak 684.000 tenaga kerja, namun yang terlindungi baru 66.000 naker atau belum mencapai 10 persen. **(San)-d**



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI C DPRD KABUPATEN SLEMAN

Memastikan Hewan Kurban Bebas PMK



KR-Saifullah Nur Ichwan

Ir Abdul Kadir MH

SLEMAN (KR) - Umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban. Pemerintah daerah melalui dinas terkait supaya mengawasi terhadap hewan-hewan kurban, baik di pedagang di pasar maupun peternak untuk memastikan bebas dari Penyakit mulut dan kuku (PMK).

Anggota Komisi C DPRD Sleman H Ir Abdul Kadir MH mengatakan, PMK ini masih menjadi ancaman bagi ternak. Padahal umat Islam akan

menyembelih hewan kurban untuk merayakan Idul Adha. Sehingga di Kabupaten Sleman ini dibutuhkan ribuan hewan kurban baik sapi, kambing maupun domba.

"Ancaman PMK terhadap hewan kurban itu masih ada. Dan Idul Adha ini, umat Islam membutuhkan ribuan hewan kurban yang sehat dan layak untuk disembelih sesuai syariat Islam," kata Abdul Kadir, Senin (26/6).

Dalam menghadapi Idul Adha ini, Kadir meminta kepada dinas terkait untuk memantau terhadap keluar masuk hewan kurban di Kabupaten Sleman. Termasuk mengawasi dan memeriksa hewan kurban di pasar maupun peternak di pasar maupun peternak. Hal itu untuk memastikan hewan kurban bebas PMK.

"Dalam pengawasan hewan kurban, pemerintah daerah perlu menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama ter-

kait rekomendasi dan layanan hewan kurban. Juga dalam pengawasan teknis di kandang, pasar tiban, hingga tempat-tempat pemotongan hewan kurban," pintanya.

Tak kalah penting, Kadir menyarankan pemerintah daerah menggandeng dokter

atau tenaga kesehatan hewan untuk melaksanakan pemeriksaan antemortem dan posmortem hewan kurban. Yakni pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih. Dilanjutkan pemeriksaan jeroan dan karkas setelah hewan disembelih. "Beker-

jasama dengan dokter atau tenaga kesehatan hewan itu sangat diperlukan pada saat Hari Raya Idul Adha. Hal ini untuk memastikan daging kurban layak dikonsumsi masyarakat," saran politisi dari Fraksi PAN ini.

Sedangkan Anggota Ko-



KR-Saifullah Nur Ichwan

Komis C sedang rapat dengan mitra kerja di Kantor DPRD Kabupaten Sleman.



KR-Saifullah Nur Ichwan

Untung Basuki Rahmat SAG

belihan hewan kurban. Hal itu lebih terkait pada teknis serta kelengkapan sarana dan prasarananya. Di antaranya pisau yang layak untuk menyembelih hewan kurban atau cara memotongnya, serta bagaimana mengondisikan hewan kurban supaya tidak stres sebelum disembelih.

"Pengawasan pascapenyembelihan hewan kurban juga belum maksimal. Padahal distribusi kurang masuk daging kurban di Sleman cukup tinggi," pungkas Untung. **(Sni)-d**